

## PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Febriana Nafi'ah Vidyasari

*febiynavi@gmail.com*

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

The research aimed to examine the effect of accountability of local government financial management and financial accounting system on quality of local government financial statement. Moreover, the research was empirical study of Financial Management Board and Local Asset of Madiun. Furthermore, there were some indicators of good quality of financial statement i.e trusted, relevant, understandable and comparable. The research was quantitative. Meanwhile, the instrument used survey. Additionally, the data collection technique used purposive sampling. For the data, it used primary, which taken directly from sources. In line with, there were 40 employees as sample. In addition, the testing instrument used validity, reliability, classical assumption test included; normality, heteroscedacity, multicollinearity and hypothesis test also multiple linear regression with SPSS 25. The research result concluded: (1) Accountability of local government financial management had positive and significant on quality of local government financial statement, (2) Financial accounting system had positive and significant on quality of local government financial statement.

*Keywords: quality of financial statement of local government, accountability of local financial management, local financial accounting system*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dalam bentuk studi empiris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun. Tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, maka indikator dalam penelitian adalah mewujudkan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami serta dapat dibandingkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data menggunakan data primer yang diambil langsung dari sumbernya. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 40 pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun. Pengujian data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu diantaranya uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas dan pengujian hipotesis. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

*Kata Kunci: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah*

### PENDAHULUAN

Dalam sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas terhadap daerah untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan mengelola

sumber-sumber keuangan. Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*, salah satu pilar yang menentukan adalah kualitas perencanaan keuangan. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Dengan maksud tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam pendayagunaan potensi daerah masing-masing untuk memajukan daerah tersebut. Dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan terhadap pembangunan tanpa harus mengurangi harapan masih adanya bantuan atau bagian dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas serta aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Otonomi Daerah merupakan bagian dari demokrasi dalam menciptakan sebuah sistem akuntansi di daerah. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik yang mengelola dana dari masyarakat, dituntut untuk dapat memberikan informasi publik melalui sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *Stakeholder* (Defitri, 2014). Untuk itu aparat pemerintah harus dapat mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi asimetris dalam pengelolaan keuangan daerah (Defitri, 2016). Pengakuan bahwa pemerintah daerah merupakan pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi dimana tujuan dari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah untuk perekonomian daerah yang berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, artinya bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan oleh pemeriksa yakni: (a) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (b) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (c) opini Tidak Wajar, dan (d) Pernyataan Menolak dalam memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*). Bastian (2011:194) menyatakan, terdapat lima jenis pendapat yang diberikan, yaitu: (1) Pendapat wajar tanpa pengecualian, (2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas, (3) Pendapat wajar dengan pengecualian, (4) Pendapat tidak wajar, (5) Pernyataan tidak memberikan pendapat.

Pemerintah daerah telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan kualitas LKPD dapat tercapai karena pemerintah daerah melakukan perbaikan yakni terkait penatausahaan aset tetap, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), pemulihan kelebihan pembayaran belanja barang/jasa dan belanja modal dengan menyetorkan ke kas daerah, serta penyajian pendapatan dan belanja operasi BLUD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun perbaikan telah dilakukan, namun masih terdapat 99 LKPD yang belum memperoleh opini WTP. Hal tersebut disebabkan karena ketidaksesuaian LKPD secara material dengan SAP atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Permasalahan tersebut yang terjadi pada akun aset tetap terdapat pada 78 pemerintah daerah, aset lancar 48 pemerintah daerah dan belanja operasional 34 pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD

tahun 2018 mengungkapkan 12.117 permasalahan yakni terdiri dari 5.858 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yakni bekisar Rp.2.19 triliun.

Permasalahan SPI terdiri atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan pelaksanaan pendapatan dan belanja, serta kelemahan pada struktur pengendalian intern. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan tercatat sebanyak 4.001 permasalahan yaitu sebesar Rp.2.19 triliun, serta penyimpangan administrasi sebanyak 2.258 permasalahan. Atas hal tersebut, BPK mengapresiasi dukungan pimpinan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan jajarannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang intensif dari DPD dapat mendorong efektivitas tindak lanjut pada hasil pemeriksaan BPK (BPK, 2019).

Berdasarkan Fenomena diatas, kualitas laporan keuangan daerah atas pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban (Baridwan, 2004). Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi kriteria seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Pemerintah daerah yang mampu memenuhi kriteria tersebut berarti mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus memahami suatu sistem akuntansi khususnya sistem akuntansi keuangan daerah guna informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang andal.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana hal-hal tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat serta negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara proporsional. Peraturan Menteri Daerah dalam Negeri/Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan baik secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan sebuah sistem akuntansi mempunyai peran penting karena berfungsi dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memiliki kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Salah satu bentuk upaya konkret untuk dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis

serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah daerah Kabupaten Madiun Jawa Timur merupakan salah satu bagian pemerintahan yang mengelola sumber daya daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Madiun wajib menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah diatur, yakni Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri/Permendagri No. 56 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Masalah yang sering terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban aparatur pemerintah yang masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena instrumen yang digunakan masih tidak jelas ruang lingkup dengan penggunaannya. Secara teoritis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok, yaitu: *verifiability*, *responsibility*, dan *answerability*. Dengan demikian instrumen akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur pertanggungjawaban secara internal maupun eksternal. Dan juga kecenderungan konsep akuntabilitas yang masih cenderung menekan pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (*selected officials*) namun kurang menekankan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat luas. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas penelitian ini berjudul: Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun). Rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah (1) Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?, (2) Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN TEORITIS

### Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Ciri-ciri Pemerintah Daerah

Adapun ciri-ciri pemerintahan daerah menurut J. Oppenheion, yakni sebagai berikut: (1) Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil daripada negaranya, (2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi, (3) Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan daerah itu sendiri, sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya, (4) Adanya suatu organisasi daerah yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan daerah tersebut, (5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan (Utama, 1991:1).

## **Akuntabilitas**

Mardiasmo (2002) menyatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

## **Pengukuran Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat empat dimensi sebagai alat pengukuran akuntabilitas, yaitu:

### **Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum**

Kejujuran terkait akuntabilitas dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

### **Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark-up* dan pungutan-pungutan lain di luar dari yang telah ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

### **Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

### **Akuntabilitas Kebijakan**

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### **Ruang Lingkup dan Instrumen Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu kunci untuk dapat memastikan bahwa kekuasaan yang telah dijalankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berjalan dengan baik sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas telah mensyaratkan kejelasan terkait siapa yang bertanggungjawab, kepada siapa pertanggungjawaban ditujukan, dan apa yang telah dipertanggungjawabkan.

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya yaitu segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Undang-Undang No.17 Tahun 2003) dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tugas pemerintah daerah dalam menjalankan segala aspek keuangan sesuai dengan peraturan pemerintahan. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah: (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi atau keterbukaan, (3) *Value for Money*: Ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

### Asas Pengelolaan Keuangan Daerah (UU No.13 Tahun 2006)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab atas asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

### Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tingkat pertanggungjawaban pengelolaan daerah yang bersifat komprehensif/luas dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada publik. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran pemerintah, laporan tahunan, data secara periodik yang dipublikasikan dan hasil dari investigasi dan laporan umum lainnya.

### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak terkait pelaksana pemerintahan daerah. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah: (1) Prosedur penerimaan kas, (2) Prosedur pengeluaran kas. Aturan dasar Sistem Akuntansi Keuangan Daerah: (1) Identifikasi kegiatan operasi yang relevan, (2) Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat, (3) Sistem pengendalian reliabilitas, (4) Menghitung pengaruh operasi.

### Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas publik. Komponen Laporan Keuangan Daerah: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan Atas Laporan Keuangan.

### Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator (Darwanis dkk, 2016:60) yakni: (1) Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan, (2) Ketepatan waktu pelaporan keuangan, (3) Kelengkapan informasi, (4) Penyajian secara jujur, (5) Isi laporan harus dapat diverifikasi, (6) Isi laporan harus dapat dibandingkan, (7) Keakuratan dan kejelasan informasi yang diajukan.

### Penelitian Terdahulu

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

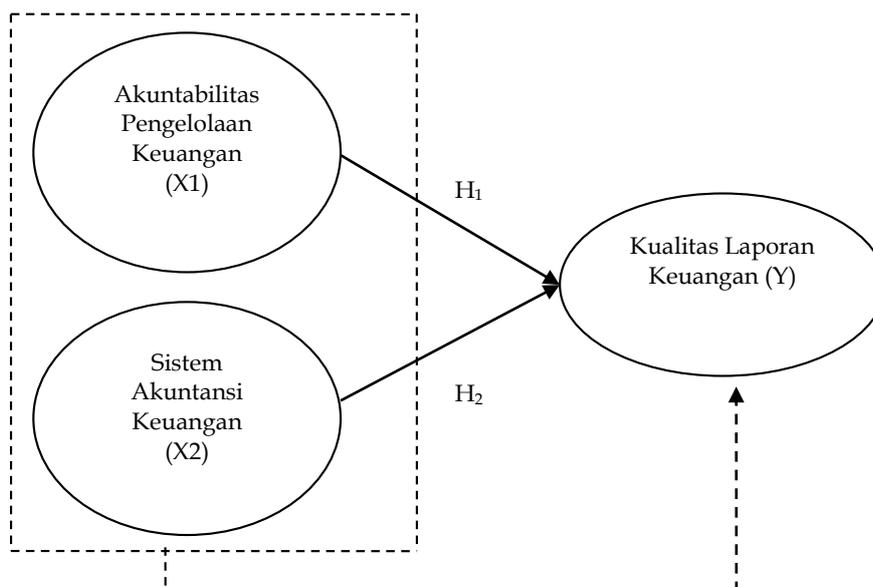
Peneliti dan Judul	Metode	Temuan
1. Ni Made Rika Krisna Dewi (2014): Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode statistik data yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan metode analisis regresi linear berganda.	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peneliti dan Judul	Metode	Temuan
2. Rizky Vallen Idji, (2013): Pengaruh Pelaksanaan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Siska Yulia Defitri (2018): Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode <i>survei</i> melalui penyebaran kuesioner kepada responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Sri Ayu Wulandari Aswadi (2014): Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah,	Metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dan penyebaran kuesioner.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
5. Angga Dwi Permadi (2013): Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis koefisien korelasi <i>rank spearman</i> .	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Sumber: Data primer diolah, 2020

### Rerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun rerangka pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1  
Rerangka Konseptual

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_1$ ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tingkat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada publik. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan. Menurut Suparno (2012:5) dalam penelitiannya mengenai akuntabilitas keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara simultan akuntabilitas keuangan daerah, kejujuran, transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan secara parsial akuntabilitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan serta penelitian terdahulu tersebut peneliti dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

#### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_2$ ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).**

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Latifah dan Sabeni, 2007). Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengelola keuangan daerah atas data terkait menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Dengan menggunakan sistem akuntansi, resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat. Menurut hasil penelitian (Wati *et al.*, 2014) yang memberikan informasi bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian jika sistem keuangan daerah diterapkan dengan baik dari awal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin lebih baik. Berdasarkan penjelasan serta penelitian terdahulu tersebut peneliti dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Penelitian survei yaitu suatu penelitian untuk mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data (Morissan, 2017:166). Adapun penelitian survei yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan suatu informasi permasalahan atau kesesuaian data dengan analisis subyek penelitian serta menguji pengaruh antara dua variabel dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di BPKAD Kabupaten Madiun.

#### **Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:49) teknik *purposive sampling* merupakan teknik

yang dipergunakan untuk pengambilan sampel secara representatif melalui kriteria pemilihan sampel. Penggunaan teknik ini bertujuan guna kriteria sampel yang diperoleh benar sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Berdasarkan pada persoalan tersebut, maka kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun yakni pegawai yang terlibat langsung dalam proses pelaporan keuangan serta sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 40 pegawai/responden yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil).

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2013:223), data primer yaitu sumber data (*primer*) yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini yaitu jawaban responden dari kuesioner yang disebar untuk dianalisis. Berdasarkan pengukuran konsep nominal sikap, metode yang digunakan dalam pemberian skor adalah *skala likert*.

Tabel 2  
Skala Likert Pada Pertanyaan-pertanyaan Dalam Kuesioner

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2011:94)

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel.

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel dependen (Y) dan 2 (dua) variabel independen (X).

### Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X<sub>1</sub>)

Merupakan prinsip pertanggungjawaban pengelolaan anggaran daerah serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya untuk memberikan informasi dan pengungkapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Indikator akuntabilitas terdiri atas 4 (empat) dimensi, yakni akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Adapun kisi-kisi kuesioner terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Kisi-kisi Kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X<sub>1</sub>)

No.	Pernyataan
1.	APBD dikelola berdasarkan atas kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku
2.	APBD diproses dan pertanggungjawaban diawasi secara terus menerus.
3.	APBD dikelola sesuai rencana strategi daerah dan arah kebijakan umum.
4.	APBD dikelola sesuai dengan program yang direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.
5.	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan.
6.	Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan.
7.	APBD dikelola secara ekonomis guna menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
8.	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah.

Sumber: Peggy Sande 2008 diolah, 2020

### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X<sub>2</sub>)

Merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintahan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah erat kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dengan tujuan untuk mengambil langkah masa depan pemerintah daerah. Adapun kisi-kisi sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Kisi-kisi Kuesioner Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X<sub>2</sub>)**

No.	Pernyataan
1.	Penerapan sistem akuntansi pada SKPD sudah sesuai dengan SAP.
2.	Melakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi keuangan yang terjadi di SKPD.
3.	Melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi di SKPD.
4.	Setiap pencatatan yang ada disertai oleh bukti yang jelas dan akurat.
5.	Pencatatan yang dilakukan pada SKPD terlaksana secara kronologis.
6.	Melakukan klasifikasi pada setiap transaksi yang terjadi.
7.	Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dilakukan setiap periode akuntansi.
8.	Pelaporan laporan keuangan pada SKPD dilakukan dengan konsisten dan secara periodik.

Sumber: Putriasri Pujanira, 2017

### Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Merupakan pecapaian hasil atas entitas pelaporan pemerintahan daerah dalam penyajian informasi keuangan atas laporan terstruktur mengenai posisi keuangan pada pemerintah daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan berdasarkan tujuan pemerintahan. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila mampu memenuhi karakteristik kualitatif atas pelaporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik serta dapat diterima oleh pengguna informasi maka pemerintahan layak dinyatakan sebagai pemerintahan dengan tata kelola yang baik (*Good Governance*). Adapun kisi-kisi kinerja pengelolaan anggaran dapat dilihat pada Tabel 5 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Kisi-kisi Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)**

No	Pernyataan
1.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan pertanggungjawaban.
2.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memprediksi aktivitas keuangan di masa yang akan datang.
2.	Laporan keuangan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi dan kekeliruan dalam penggunaan dapat dicegah.
3.	Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan yang bersifat material.
4.	Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
5.	Informasi dalam laporan keuangan adalah wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.
6.	Informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya.
7.	Informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sumber: Putriasri Pujanira, 2017

## Teknik Analisis Data

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini hanya digunakan apabila peneliti ingin mendeskripsikan dan membuat kesimpulan data sampel, dan tidak berlaku untuk data atas populasi dimana sampel tersebut diambil (Ghozali, 2018).

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:45). Suatu item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid apabila koefisien korelasi  $> 0,3$  dan Signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 0,005$ ). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, apabila  $r$  hitung  $> r$  tabel maka item dikatakan valid. Dan sebaliknya, apabila  $r$  hitung  $< r$  tabel maka item dikatakan tidak valid.

#### Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:42) menyatakan bahwa suatu kuesioner dikatakan reliabel dan handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Reliabilitas pada suatu konstruk yang terdapat pada variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Alpha Cronbach's*  $> 0.60$ .

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang berdistribusi normal atau mendekati nol adalah model regresi yang baik. Pengujian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov- Smirnov* (K-S) dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 apabila nilai signifikansi di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Jika *Kolmogorov - Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data residual tidak berdistribusi secara normal (Ghozali, 2018).

##### Uji Multikolinearitas

Menurut Suliyanto (2011:82) menyatakan bahwa multikolinieritas terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Untuk mendeteksi uji multikolinieritas dapat menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai Toleransi. Dengan syarat, jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas begitu pun sebaliknya.

##### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau untuk melihat penyebaran data. Dasar analisis biasanya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018) sebagai berikut: (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) yang tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika tidak ada pola yang jelas, dan juga titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda adalah analisis regresi dengan dua variabel ataupun lebih variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu dua variabel

independen dan satu variabel dependen. Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan oleh seorang peneliti sebagai berikut:

$$KLK (Y) = \alpha + \beta_1 AkPK + \beta_2 SAK + e$$

Keterangan:

Y (KLK) : Kualitas laporan keuangan  
 $\alpha$  : Konstanta (tetap)  
 $\beta_1, \beta_2$  : Koefisien regresi  
 AkPK ( $X_1$ ) : Akuntabilitas pengelolaan keuangan  
 SAK ( $X_2$ ) : Sistem akuntansi keuangan  
 e : Kesalahan baku (*error*)

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018:97) mengemukakan bahwa pada pengujian untuk mengetahui tingkat kepercayaan terbaik dalam analisis linier, dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya angka koefisien determinasi, koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variasi-variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Jika  $R^2 = 0$  maka tidak ada sedikitpun prosentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, jika  $R^2 = 1$  maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel dependen sempurna.

### Uji t

Uji Parsial atau bisa disebut dengan uji t menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel bebas dalam penelitian ini baik secara individual dalam mengemukakan variabel terikat secara parsial. Uji t memiliki tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan menggunakan SPSS. Hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jika hipotesis diterima atau dikatakan variabel independen signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

### Uji F

Uji ketetapan atau kelayakan model atau biasa disebut F bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap model penelitian yang layak untuk dilakukan pengujian. Jika nilai *goodness of fit statistic* < 0,05 maka  $H_0$  diterima, yang artinya model mampu memprediksi nilai observasi sehingga model penelitian yang dilakukan sudah tepat.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Subjek Penelitian

Gambaran subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu usia responden, jenjang pendidikan terakhir, lama bekerja, dan jenis kelamin. Gambaran subjek penelitian tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6  
Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Dasar klasifikasi	Sub Klasifikasi	Frekuensi	
		Absolut	Presentase
Umur	25 - 29 Tahun	5	12,5%
	30 - 35 Tahun	7	17,5%
	36 - 40 Tahun	9	22,5%

41 - 45 Tahun	9	22,5%
46 - 50 Tahun	5	12,5%
> 50 Tahun	5	12,5%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok responden yang memiliki rentang usia 36 sampai dengan 45 tahun dengan jumlah 18 orang atau dengan presentase 22,5% dari total seluruh responden menunjukkan bahwa pegawai dengan rentang usia 36 sampai dengan 45 tahun sudah memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

### Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7  
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dasar klasifikasi	Sub Klasifikasi	Frekuensi	
		Absolut	Presentase
Pendidikan Terakhir	Diploma	3	7,5%
	Sarjana	34	85%
	Magister	3	7,5%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar pegawai yang menjadi responden penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak 34 orang atau dengan presentase 85% dari total seluruh responden. Data tersebut menunjukkan sebagian besar pegawai berpendapat bahwa pendidikan Sarjana (S1) yang mereka jalani sudah cukup untuk menjadi sumber pengetahuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

### Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Deskripsi responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8  
Karakteristik Responden berdasarkan Lama Bekerja

Dasar klasifikasi	Sub Klasifikasi	Frekuensi	
		Absolut	Presentase
Lama Bekerja	1 - 5 Tahun	9	22,5%
	6 - 10 Tahun	11	27,5%
	> 10 Tahun	20	50%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok responden yang memiliki pengalaman kerja berdasarkan lamanya bekerja dengan jumlah 20 orang atau 50% dari total seluruh responden menunjukkan bahwa pegawai yang lebih lama dalam pengalaman bekerja lebih dapat dipercaya dalam hal terkait pengetahuan, pengalaman serta dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

### Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9  
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Dasar klasifikasi	Sub Klasifikasi	Frekuensi	
		Absolut	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	19	47,5%
	Perempuan	21	52,5%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar pegawai berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 21 orang atau dengan presentase 52,5% dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 19 orang atau dengan presentase 47,5%. Data tersebut menunjukkan bahwa pegawai dengan jenis kelamin perempuan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dimana pegawai dengan jenis kelamin perempuan diyakini lebih teliti, aktif dan responsif dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

### Analisis Deskriptif

Dalam menentukan dasar suatu kategori rata-rata dari hasil jawaban responden dengan menggunakan interval penilaian (Sugiyono, 2007:85). Rumusan penilaiannya sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kelas}} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Tabel 10  
Penentuan Kategori Berdasarkan Nilai Mean

Kelas Interval	Kategori	Keterangan
4,20 - 5,00	5	Sangat setuju
3,40 - 4,19	4	Setuju
2,60 - 3,39	3	Netral
1,80 - 2,59	2	Tidak setuju
1,00 - 1,79	1	Sangat tidak setuju

Sumber: Sugiyono, 2014:85

### Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 11 menunjukkan deskripsi jawaban 40 responden untuk masing-masing butir pernyataan mengenai variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Rata-rata jawaban responden untuk butir pernyataan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan yakni 4,6875. Berdasarkan kelas interval nilai rata-rata jawaban responden terkait variabel tersebut adalah sangat setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat baik. Indikator AkPK1 merupakan indikator dengan nilai rata-rata tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai melaksanakan pengelolaan APBD berdasarkan atas kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

Tabel 11  
Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Butir	Jumlah Jawaban Responden					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
AkPK1	0	0	0	9	31	4,78
AkPK2	0	0	0	10	30	4,75
AkPK3	0	0	0	16	24	4,60
AkPK4	0	0	0	12	28	4,70
AkPK5	0	0	0	12	28	4,70
AkPK6	0	0	1	9	30	4,72

AkPK7	0	0	0	16	24	4,60
AkPK8	0	0	0	14	26	4,65

Sumber: Data primer diolah, 2020

### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tabel 12 menunjukkan deskripsi jawaban 40 responden untuk masing-masing butir pernyataan mengenai variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Rata-rata jawaban responden untuk butir pernyataan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara keseluruhan yakni 4,5675. Berdasarkan kelas interval nilai rata-rata jawaban responden terkait variabel tersebut adalah sangat setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat baik. Indikator SAK4 merupakan indikator dengan nilai rata-rata tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai melaksanakan setiap pencatatan pelaporan keuangan disertai dengan bukti yang jelas dan akurat.

**Tabel 12**  
Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Butir	Jumlah Jawaban Responden					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
SAK1	0	0	1	15	24	4,58
SAK2	0	0	0	23	17	4,43
SAK3	0	0	0	17	23	4,57
SAK4	0	0	0	13	27	4,67
SAK5	0	0	1	20	19	4,45
SAK6	0	0	0	17	23	4,58
SAK7	0	0	0	15	25	4,63
SAK8	0	0	0	15	25	4,63

Sumber: Data primer diolah, 2020

### Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Tabel 13 menunjukkan deskripsi jawaban 40 responden untuk masing-masing butir pernyataan mengenai variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Rata-rata jawaban responden untuk butir pernyataan mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah secara keseluruhan yakni 4,5462. Berdasarkan kelas interval nilai rata-rata jawaban responden terkait variabel tersebut adalah sangat setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat baik. Dengan penyajian yang baik maka pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas akan sangat mungkin tercapai. Indikator KLK8 merupakan indikator dengan nilai rata-rata tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai melaporkan informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pelaporan keuangan pada periode sebelumnya.

**Tabel 13**  
Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Butir	Jumlah Jawaban Responden					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
KLK1	0	0	0	14	26	4,65
KLK2	0	0	0	21	19	4,47
KLK3	0	0	1	20	19	4,45
KLK4	0	0	0	25	15	4,37
KLK5	0	0	0	18	22	4,55
KLK6	0	0	0	14	26	4,65
KLK7	0	0	2	14	24	4,55

KLK8	0	0	0	13	27	4,68
------	---	---	---	----	----	------

Sumber: Data primer diolah, 2020

### Uji Validitas

Berdasarkan tabel 14, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah sudah valid karena nilai signifikansi hitung  $> 0,05$ .

Tabel 14  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Pearson Correlation atau r hitung	r tabel	Sig	Kesimpulan
AkPK	AkPK1	0,729	0,3120	0,000	Valid
	AkPK2	0,792	0,3120	0,000	Valid
	AkPK3	0,875	0,3120	0,000	Valid
	AkPK4	0,823	0,3120	0,000	Valid
	AkPK5	0,730	0,3120	0,000	Valid
	AkPK6	0,661	0,3120	0,000	Valid
	AkPK7	0,770	0,3120	0,000	Valid
	AkPK8	0,881	0,3120	0,000	Valid
SAK	SAK1	0,864	0,3120	0,000	Valid
	SAK2	0,782	0,3120	0,000	Valid
	SAK3	0,811	0,3120	0,000	Valid
	SAK4	0,854	0,3120	0,000	Valid
	SAK5	0,743	0,3120	0,000	Valid
	SAK6	0,841	0,3120	0,000	Valid
	SAK7	0,827	0,3120	0,000	Valid
	SAK8	0,874	0,3120	0,000	Valid
KLK	KLK1	0,866	0,3120	0,000	Valid
	KLK2	0,881	0,3120	0,000	Valid
	KLK3	0,784	0,3120	0,000	Valid
	KLK4	0,825	0,3120	0,000	Valid
	KLK5	0,853	0,3120	0,000	Valid
	KLK6	0,866	0,3120	0,000	Valid
	KLK7	0,844	0,3120	0,000	Valid
	KLK8	0,829	0,3120	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Untuk mengetahui validitas pada setiap pernyataan, maka nilai pada kolom korelasi (*Collected item-total colleration*) yang merupakan nilai  $r_{hitung}$  dibandingkan dengan  $r_{tabel}$ . Untuk menentukan nilai  $r_{tabel}$  terlebih dahulu dihitung derajat nilai bebas (*degree of freedom*) dengan rumus  $n-2$ , dimana  $n$  menyatakan banyaknya responden untuk uji validitas. Diketahui jumlah responden yaitu sebanyak  $n=40$  responden, sehingga derajat bebas bernilai  $n-2 = 40-2=38$  maka diperoleh  $r_{tabel} = 0,312$ . Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefisien korelasi yang mendapat nilai lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,312$ . Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas diketahui seluruh pernyataan bersifat valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2013:48).

**Tabel 15**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Cut-Off	Kesimpulan
AkPK	0,909	0,60	Reliabel
SAK	0,932	0,60	Reliabel
KLK	0,941	0,60	Reliabel

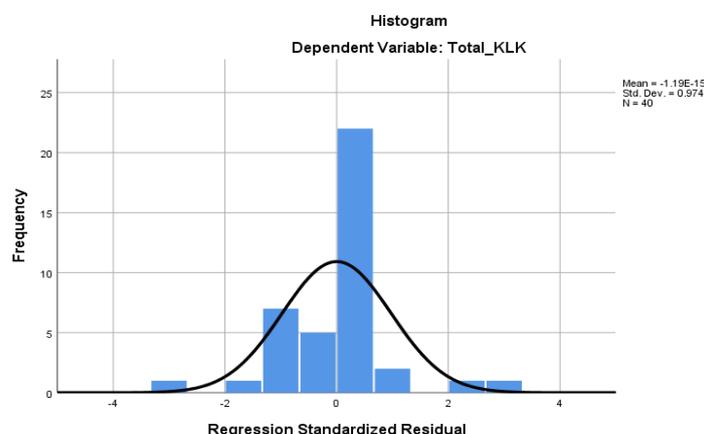
Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien (r) *alpha* hitung seluruh variabel lebih besar dibandingkan dengan kriteria yang dipersyaratkan yaitu sebesar 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa butir-butir pernyataan seluruh variabel dalam keadaan reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik histogram:



**Gambar 2**  
**Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas**  
Sumber: Data primer diolah, 2020

Menurut hasil uji normalitas pada grafik histogram di atas menunjukkan bahwa grafik histogram berbentuk seperti lonceng, tidak condong ke kiri atau kanan. Uji normalitas dengan grafik histogram dikatakan normal apabila distribusi data membentuk lonceng (*bell shaped*), tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji normalitas dengan grafik histogram perlu diperkuat dengan menggunakan uji statistik. Maka dari itu untuk memastikan hasil grafik berdistribusi normal, dapat dilihat hasil uji statistik pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Hasil Uji Normalitas**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

	Unstandardized Residual
N	40
Test Statistic	0,188
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,104

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil pengujian normalitas data dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel di atas menunjukkan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,104 atau 10,4% lebih besar dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat dikatakan data residual berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas yang digunakan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
AkPK	0,517	1,933
SAL	0,517	1,933

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil perhitungan nilai *tolerance* pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Nilai *tolerance* 0,517 > 0,1 dan VIF 1,933 < 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

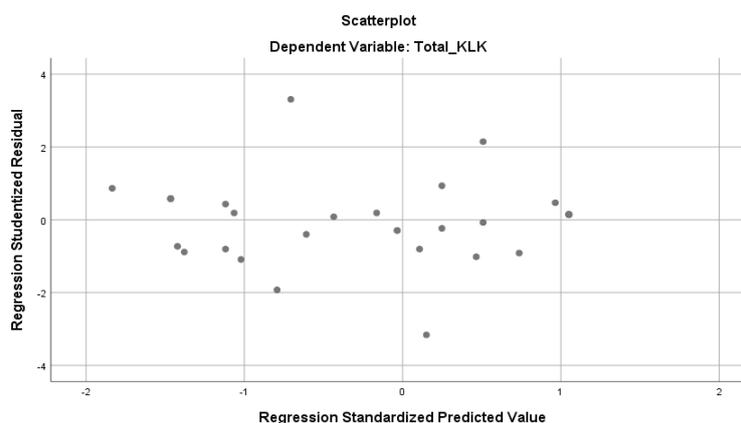
Hasil uji heteroskedastisitas yang digunakan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Sig.
1 (Constant)	0,084
AkPK	0,867
SAK	0,175

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya Sig. lebih dari atau di atas 0,05 (Sig. > 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel yang diajukan data dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan gambar grafik analisis *Scatter Plot* hasil uji heteroskedastisitas:



**Gambar 3**  
**Scatter Plot Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil analisis grafik *Scatter Plot* diatas menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada

sumbu Y. Titik-titik tidak mengumpul diatas atau di bawah dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa data pada variabel penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Hasil dari analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	-2.003	1.928		-1.039	.306
Total_AkPK	.144	.069	.124	2.076	.045
Total_SAL	.903	.061	.876	14.713	.000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$KLK = -2,003 + 0,144 AkPK + 0,903 SAK + e$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan bahwa: (1) Konstanta ( $\alpha$ ) = -2.003 menunjukkan harga konstan, bahwa jika tidak ada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ( $X_1$ ) dan sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_2$ ) yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) adalah konstan, (2) Koefisien regresi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah 0,144 (positif). Dapat diartikan bahwa semakin efektif dan efisien akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, (3) Koefisien regresi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah 0,903 (positif). Dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Hasil Uji Kefesisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R-Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.966 <sup>a</sup>	.932	.929	.921

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa nilai *R-Square* sebesar 0,932 yang berarti bahwa 93,2% variabel independen yang terdiri dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan sisanya 6,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang diteliti.

### Uji t (Uji Parsial)

Hasil uji t analisis regresi parsial yang digunakan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 21**  
**Hasil Uji t (Uji Parsial)**

	Model	T	Sig.
1	(Constant)	-1,039	0,306
	AkPK	2,076	0,045
	SAK	14,713	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil uji t (pengujian parsial) dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Nilai signifikansi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah  $0,045 < 0,05$ , maka Hipotesis 1 diterima. Artinya, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, (2) Nilai signifikansi variabel sistem akuntansi keuangan daerah  $0,000 < 0,05$ , maka Hipotesis 2 diterima. Artinya, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### Uji F

Hasil uji F yang digunakan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 22**  
**Hasil Uji F**

	Model	F	Sig.
1	Regression	254,433	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil Uji F pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya, bahwa *Model Regresi Fit* dan secara simultan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### Pembahasan

#### Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, hasil yang didapat yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah, yang berarti bahwa  $H_1$  diterima. Adanya pengaruh positif yaitu menunjukkan bahwa antara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan daerah adalah searah. Artinya, apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik atau meningkat, maka tingkat kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Madiun juga akan semakin tinggi dan presentase opini wajar yang diberikan oleh BPK juga akan ikut meningkat. Sedangkan adanya pengaruh yang signifikan dapat dilihat dari nilai probabilitas dalam uji t (uji parsial) dalam penelitian ini, yaitu  $0,045 < 0,05$ . Berarti bahwa antara kedua variabel tersebut memang terdapat pengaruh yang signifikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian bahwa pelaksanaan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian Made (2014), bahwa hasil pengujian hipotesis baik secara parsial maupun simultan

pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah selaku pembawa amanah yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola keuangan daerah harus dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik, sehingga pandangan masyarakat atas pemerintah juga ikut serta membaik. Dengan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat memberikan kompetensi bahwa penyajian laporan keuangan akan mencapai kualitas yang baik.

### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah sehingga  $H_2$  diterima. Berdasarkan pengujian hipotesis  $H_2$  melalui uji F terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa peneliti yaitu, menurut Made (2014), bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Defitri (2018), bahwa hasil penelitian menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif akan sangat membantu proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Madiun. Selain itu, semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola dan sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengikhtisaran dan penggolongan yang dilakukan dengan Standar Operasional Pemerintah (SOP) Daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut: (1) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Keterbatasan**

Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: (1) jumlah responden hanya berjumlah 40 orang/responden tentunya masih cukup kurang untuk melakukan analisis hasil terhadap penelitian ini, (2) Hasil penelitian ini menggunakan sampel hanya terbatas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun saja. Kemungkinan adanya perbedaan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan dapat saja terjadi apabila penelitian dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, (3) Dalam penelitian ini peneliti hanya mengkategorikan sampel penelitian pada bidang pengelolaan aset dan akuntansi saja, sehingga peneliti hanya dapat memahami terkait lingkup sampel penelitian tersebut.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan saran untuk penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : (1) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun yaitu Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang akuntansi untuk bisa lebih memaksimalkan teknologi untuk pemanfaatan sistem informasi akuntansi khususnya aplikasi SIMDA Keuangan supaya bisa terkoneksi satu sama lain sehingga tidak perlu lagi kembali melakukan penginputan manual, (2) Bagi pegawai untuk bisa meningkatkan efektivitas pengawasan serta mengoptimalkan pengawasan secara berkala terhadap pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, (3) Meningkatkan pengawasan keuangan daerah berbasis online sehingga dapat lebih memudahkan dalam pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hafiz Tanjung. 2009. *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Alfabeta. Bandung.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun, <https://bpkad.madiunkab.go.id/rss>. Diakses tanggal 11 Desember 2020.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi 8. BPFE. Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Akuntansi sektor publik*. Erlangga. Jakarta.
- BPK RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018, <http://www.bpk.go.id>, Diakses tanggal 5 November 2020.
- Darwanis, Muhammad Arfan dan Iqlima A. Manaf, 2016. The Effect of Understanding of Government Accounting Standard and Internal Control System on Quality of Financial Statement from Local Government through Review Process of Financial Statement by Inspectorate Agency (A Study at Inspectorate Agencies in the Regencies and Cities of the Province of Aceh, Indonesia). *Journal*. 7(4).
- Defitri, Siska Yulia. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita* 3(1) Februari 2018 (64-75).
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Edisi 1. Semester Rakyat Merdeka. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Herawati, T., 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR-Study & Accounting Research*, 11(1), 1-14.
- Indonesia, Republik. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Idji, Rizky Vallen. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Skripsi*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Latifah dan Sabeni. 2007. Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Mardiasmo. 2001. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Makalah Seminar*. MEP-UGM. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Morissan. 2017. *Metode Penelitian Survei, Kencana*. Jakarta.

- Made, Krisna Dewi, Ni. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Nugraheni, P., dan Subaweh, I. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 11(1), 29-39.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Edisi 2. Jakarta.
- Nordiawan, D. Iswahyudi, S.P., dan Maulidah R. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_ No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_ No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_ No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_ No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pujania, Putriasri. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal NOMINAL*, 6(2).
- Sande, Peggy. 2008. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi*. Universitas Negeeri Padang.
- Soleh, Chabib. 2014. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung*. Fokus Media. Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Ekonometrika Terapan. Edisi 1. Yogyakarta.
- Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai). *Thesis*. Medan Program Pasca Sarjana. Sumatera Utara.
- Utama, Prabawa. 1991. *Pemerintahan Daerah*. Ind-Hill-Co. Jakarta
- Umar, Husein. 2005. *Metodologi Penelitian*. Gajah Mada. Jakarta.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_ No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_ No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_ No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_ No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan *Good Governance*.
- Wati, Herawati, dan Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *e-Journal S1 Akuntansi*, 2(1). Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yadiati, Winwin, dan Abdullah Mubarak. 2017. *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Yuliani, S., Nardirsyah, dan Bakar, U. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3(2), 2-17.